
Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan di Legislatif Kabupaten Cilacap Periode 2019-2024

Salsabila Esa Utami¹, Ririn Yulianti^{2*}, Tofan Ibrahim³

^{1,2,3} Ilmu Pemerintahan, STISIP Bina Putera Banjar, Indonesia

Email: ririnyulianti1990@gmail.com

Received: August 3, 2024

Revised: August 13, 2024

Accepted: Sept 7, 2024

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesetaraan dan keadilan gender dalam keterwakilan perempuan di legislatif Kabupaten Cilacap. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 10 orang yang dipilih sesuai keterkaitan pada penelitian ini. Analisis penelitian ini berdasarkan teori Harvard, yang memuat dimensi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam keterwakilan perempuan di legislatif Kabupaten Cilacap masih belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dari 50 anggota keseluruhan, dan di legislatif Kabupaten Cilacap hanya ada 13 anggota dewan perempuan yang seharusnya ada 15 anggota dewan perempuan sebagai syarat untuk memenuhi 30% keterwakilan perempuan, hal ini kesetaraan gender dalam keterwakilan perempuan di Legislatif Kabupaten Cilacap belum memenuhi kuota, disebabkan karena kurangnya minat perempuan dalam ranah politik, dan banyak faktor diantaranya dari mitos, perspektif masyarakat, penafsiran agama, dan adanya budaya patriarki.

Kata Kunci: Partisipasi, Legislatif, Keterwakilan, Gender

Abstract

The purpose of this study was to determine the level of gender equality and equity in women's representation in the Cilacap Regency legislature. The type of research used in this research is using a qualitative approach with descriptive methods. The technique for determining informants used a purposive sampling technique of 10 people selected according to the relevance of this study. The analysis of this research is based on Harvard theory, which includes the dimensions of access, participation, control, and benefits. The results of the study show that gender equality in women's representation in the Cilacap Regency legislature still does not meet the quota of 30% of women's representation of the total 50 members, and in the legislature of the Cilacap Regency there are only 13 female council members where there should be 15 female council members as a condition to fulfill 30% representation of women, this is gender equality in the representation of women in the Cilacap Regency Legislature has not met the quota, caused by the lack of interest of women in the political sphere, and many factors including myths, societal perspectives, religious interpretations, and the existence of a patriarchal culture.

Keywords: Participation, Legislative, Representation, Gender

PENDAHULUAN

Keterwakilan perempuan dalam parlemen merupakan hal penting untuk memastikan kebijakan yang mendukung, memberdayakan dan berkontribusi terhadap perubahan

nyata. Kondisi ideal keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan atau legislatif seharusnya sebanding dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan di negara ini. Namun demikian, 12 kali hasil pemilu menunjukkan pencapaian angka penting 30% keterwakilan perempuan. Ini dianggap sebagai tindakan khusus, tetapi sangat sulit dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah (seperti partai politik dan lembaga swadaya masyarakat), dan akademisi.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang partai politik. Pasal 2 ayat (1) menyatakan: “Partai politik didirikan dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau menikah dari setiap provinsi.” Sedangkan Pasal 2 ayat (2) dengan jelas menyatakan: “Pembentukan dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup keterwakilan perempuan sebesar 30% (tiga puluh persen)”.

Kesetaraan hak berpolitik di Kabupaten Cilacap masih belum sejajar, terbukti dengan minimnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Tengah, keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap pada periode 2019-2024 terdaftar 13 orang dari 50 jumlah keseluruhan. Dilihat dari jumlah peraturan daerah yang ada di Kabupaten Cilacap dan di kaitkan dengan 30% kuota keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang belum terpenuhi. Hal itu memungkinkan hak-hak perempuan di Kabupaten Cilacap sulit ditangani mengingat masalah yang terkait dengan perempuan sangat beraneka ragam.

Salah satu fenomena masalah yang ada di Kabupaten Cilacap adalah dalam masalah perekrutan di partai politik untuk calon anggota legislatif khususnya calon anggota legislatif perempuan dengan cara melakukan pendekatan kepada tokoh perempuan yang berpengaruh di wilayah, sebagai contoh istri-istri kepala desa dan ketua-ketua organisasi di desa-desa yang berpotensi dan sudah banyak relasi yang menunjang suara. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai alasan di balik kejadian tersebut serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebabnya. Terlihat jelas bahwa jumlah anggota parlemen perempuan masih kurang aktif dalam mengambil inisiatif.

Keterlibatan perempuan dalam peran sebagai anggota legislatif Kabupaten Cilacap perlu didukung oleh pengawalan dan perjuangan yang berperspektif gender secara berkelanjutan dalam proses pemerintahan. Oleh karena itu, anggota legislatif perempuan harus memiliki strategi yang efektif untuk meningkatkan kebijakan kepada masyarakat agar strategi yang diterapkan memiliki kualitas yang baik.

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam legislatif Kabupaten Cilacap karena perjuangan dan proses yang terus menerus demi mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai keadilan, salah satunya dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan adanya peningkatan keterwakilan perempuan. Keterkaitan perempuan dengan proses demokrasi memberikan dampak yang signifikan dan menjadikan suatu kesempatan besar bagi kaum perempuan.

LANDASAN TEORI

Gender adalah karakteristik yang menjadi dasar dalam membedakan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kondisi sosial budaya, nilai-nilai dan perilaku, psikologi dan emosi,

serta faktor nonbiologis lainnya. Secara terminologi, gender sering diartikan sebagai harapan budaya yang ditetapkan untuk laki-laki dan perempuan. Gender dipandang sebagai konsepsi budaya yang digunakan untuk membedakan peran, perilaku, psikologi, dan karakteristik emosional yang berkembang pada laki-laki dan perempuan dalam masyarakat (Alfian, 2016).

Kesetaraan gender mengacu pada hak dan kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia untuk terlibat dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan negara, dan keamanan negara. Dengan demikian, keduanya dapat menikmati manfaat dari hasil transformasi tersebut (Achmad, 2019).

Menurut Puspita dalam Ema (2016), kesetaraan gender merujuk pada keadaan di mana perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang setara, menikmati posisi yang sama, serta mendapatkan kondisi yang sebanding untuk menjalankan hak asasi manusia dan mengembangkan potensi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender adalah hak yang perlu dijamin agar laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk mengekspresikan perannya dan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Widjajanti (2016) berpendapat bahwa penentuan prioritas gender merupakan langkah penting dalam penerapan pendekatan gender. Pertama, analisis gender dapat dikaji melalui indikator kuantitatif dan kualitatif terkait perbedaan gender dalam program atau intervensi pembangunan yang sedang berjalan. Indeks ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi isu-isu seperti kesenjangan, marginalisasi dan kesenjangan gender dalam konteks sosial yang sama. Ada banyak versi analisis gender, namun analisis Harvard adalah versi yang digunakan oleh mekanisme Penganggaran Responsif Gender (GRA). Analisis Harvard adalah mekanisme yang menyaring data yang diperoleh berdasarkan gender.

Langkah selanjutnya adalah memetakan isu gender.

Untuk mengidentifikasi penyebab masalah, digunakan indikator yang diambil dari Model Analisis Gender Universitas Harvard. Analisis Harvard adalah sebuah metode analisis gender yang mempertanyakan siapa yang memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya serta intervensi pembangunan (kebijakan/program/kegiatan/pendanaan).

Analisis gender mencakup empat bidang analisis utama:

- a. Akses, yang menjadi indikator untuk menunjukkan apakah intervensi pembangunan memberikan kesempatan atau membuka jalan bagi laki-laki dan perempuan untuk terlibat serta mendapatkan manfaat dari intervensi tersebut.
- b. Partisipasi, yang menunjukkan sejauh mana laki-laki dan perempuan secara aktif terlibat dalam proses intervensi.
- c. Kontrol, yang menjadi indikator untuk melihat apakah laki-laki dan perempuan dapat memengaruhi pengambilan keputusan terkait dengan intervensi atau hanya laki-laki yang memiliki kemampuan tersebut.
- d. Manfaat, yang menggambarkan apakah intervensi tersebut memberikan keuntungan bagi laki-laki dan perempuan. Indikator ini mengidentifikasi keuntungan mana yang meningkat atau yang lebih menguntungkan bagi laki-laki (atau merugikan) serta mana yang lebih menguntungkan (atau merugikan) bagi perempuan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena atau keadaan tertentu dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang berupa kata-kata, uraian, serta makna yang diberikan oleh informan.

Menurut Tylor dan Bogdan (dalam Moleong, 2007: 4), “Metode adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang dapat diamati.”

”Metode yang digunakan untuk penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu yang mana setiap subjek yang dijadikan sampel sengaja dipilih berdasarkan tujuan dan pertimbangan peneliti. Dalam penelitian ini informan dipilih sebanyak 10 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dokumen, dan penelitian dokumen. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung fenomena yang diteliti, sedangkan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari informan melalui wawancara. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang sudah diolah sebelumnya, sedangkan studi pustaka dilakukan dengan membaca literatur dan sumber bacaan terkait masalah penelitian.

Teknik pengolahan dan analisis data kualitatif yang digunakan terdiri dari tiga langkah utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data bertujuan untuk mengorganisasi informasi yang telah diperoleh agar dapat diproses dan dianalisis lebih lanjut. Penyajian data dilakukan dalam berbagai format, seperti ringkasan naratif, diagram, atau pemetaan hubungan antar kategori. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan dengan menguji validitas dan konsistensi dari data yang telah dikumpulkan.

Tempat penelitian yang ditetapkan adalah DPRD Kabupaten Cilacap. Penelitian ini dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik-teknik yang disampaikan di atas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mendeskripsikan keadaan dan memahami mengenai kesetaraan gender dalam keterwakilan perempuan di legislatif Kabupaten Cilacap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Cilacap adalah wilayah yang berada di Jawa Tengah, berbatasan dengan wilayah sebelah selatan Samudra Indonesia. Di bagian sebelah utara, Kabupaten Cilacap berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Kuningan dari Provinsi Jawa Barat. Di sebelah timur, Kabupaten Kebumen berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar dari Provinsi Jawa Barat. Di sebelah barat, Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar juga berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap merupakan lembaga legislatif yang berkantor pusat di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. DPRD Kabupaten Cilacap memiliki 50 anggota legislatif yang tergabung dalam 9 partai politik, dengan suara terbanyak berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. DPRD Kabupaten Cilacap merupakan

organisasi perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat Kabupaten Cilacap dalam pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali.

Bentuk akses yang pertama adalah melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender dan keterwakilan perempuan di bidang politik, khususnya di legislatif Kabupaten Cilacap. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Selain itu juga untuk meningkatkan jumlah perempuan yang terwakili di lembaga legislatif. Bentuk akses yang kedua adalah media masa, mengenai kesetaraan gender dan keterwakilan perempuan di bidang politik, khususnya di legislatif Kabupaten Cilacap. Yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang akurat dan terverifikasi kepada masyarakat tentang calon, partai politik, dan isu-isu politik yang relevan. Ini membantu pemilih dalam membuat keputusan yang cerdas dan berdasarkan fakta saat mereka berpartisipasi dalam proses politik.

Bentuk akses yang ketiga yaitu dengan mengadakan kegiatan-kegiatan mengenai kesetaraan gender dan keterwakilan perempuan di bidang politik, khususnya di legislatif Kabupaten Cilacap. Kegiatan perekrutan bertujuan untuk meningkatkan jumlah perempuan yang terwakili di lembaga legislatif. Dengan memiliki lebih banyak perempuan dalam posisi kekuasaan dan pengambilan keputusan politik, kepentingan perempuan dapat lebih baik diwakili dalam proses pembuatan kebijakan. Ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi perempuan.

Melihat dari teori Harvard indikator analisis gender (Widjajanti, 2016) terdapat empat dimensi dalam kesetaraan gender yang digunakan, diantaranya yaitu akses. Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa keadilan dan kesetaraan gender di bidang politik mengenai pentingnya partisipasi dan keterwakilan perempuan di legislatif Kabupaten Cilacap telah memberikan informasi melalui sosialisasi, media massa dan mengadakan kegiatan kepada masyarakat. Dengan demikian menurut peneliti sangat erat hubungannya dengan para informan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender dalam keterwakilan perempuan di legislatif Kabupaten Cilacap harus mempunyai akses bagi anggota maupun masyarakat yang akan ikut serta dalam ranah politik.

Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dapat memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi mereka. Pendidikan yang menysasar kesetaraan gender dan pengetahuan tentang hak-hak perempuan memainkan peran kunci dalam meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap keterwakilan perempuan.

Melalui pendidikan, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kesetaraan gender sebagai prinsip dasar dalam masyarakat yang adil. Pendidikan yang mencakup isu-isu gender, stereotip gender, dan sejarah perjuangan perempuan dapat membantu mengubah persepsi dan pola pikir yang terkait dengan peran dan partisipasi perempuan dalam politik. Dengan meningkatnya pemahaman tentang pentingnya perspektif perempuan dalam pengambilan keputusan, masyarakat akan cenderung lebih mendukung dan melibatkan perempuan dalam kehidupan politik.

Jika melihat teori Harvard indikator analisis gender (Widjajanti, 2016) setidaknya terdapat empat dimensi dalam kesetaraan gender terhadap keterwakilan perempuan di Legislatif Kabupaten Cilacap diataranya yaitu partisipasi.

Dengan demikian menurut peneliti sangat erat hubungannya dengan para informan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender dalam keterwakilan perempuan di legislatif Kabupaten Cilacap harus berpartisipasi dan ikut serta dalam ranah politik di legislatif Kabupaten Cilacap.

Aspek penting dalam memperbaiki keterwakilan gender di legislatif. Melalui edukasi, masyarakat dan partai politik dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik. Kampanye dan kegiatan sosialisasi dapat dilakukan untuk mengubah persepsi stereotip dan mengedukasi masyarakat mengenai kontribusi positif yang dapat diberikan oleh perempuan dalam pengambilan keputusan politik.

Selain itu, pendekatan dalam perekrutan calon anggota partai perempuan juga harus ditingkatkan. Partai politik perlu memiliki strategi yang efektif untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik, seperti melibatkan perempuan dalam proses seleksi dan perekrutan calon, serta memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk maju dalam dunia politik.

Memperjuangkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik sangatlah penting. Melihat berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan, seperti kesenjangan gender di ranah publik, perlunya kebijakan yang melindungi dan mendukung perempuan menjadi semakin jelas. Perempuan membutuhkan wakil-wakil yang memahami dan berpihak kepada mereka, karena mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan kebutuhan yang dihadapi oleh perempuan. Melalui upaya ini, diharapkan perempuan dapat merasakan manfaat nyata dari kehadiran anggota legislatif perempuan yang peduli dan memperjuangkan kepentingan mereka. Dengan adanya perwakilan yang kuat dan berkomitmen, diharapkan kesenjangan gender dapat diperkecil, hak-hak perempuan dijamin, dan perempuan dapat mengambil peran aktif dalam pembentukan kebijakan yang berdampak positif bagi mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan adapun hasil kesimpulan mengenai Partisipasi Dan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Kabupaten Cilacap Periode 2019-2024: keterwakilan perempuan di legislatif Kabupaten Cilacap belum memenuhi kuota 30% dari jumlah keseluruhan 50 anggota dan 13 jumlah anggota perempuan. Memang selalu ada peningkatan setiap periodenya, bahkan ada juga anggota dewan perempuan yang Kembali berpartisipasi di periode ini.

Untuk perekrutan itu sendiri ada juga yang dilakukan dengan cara pendekatan kepada tokoh perempuan yang berpengaruh di wilayah tersebut, sebagai contoh istri-istri kades dan ketua-ketua organisasi di desa-desa yang berpotensi dan sudah banyak relasi yang menunjang suara, hal ini seharusnya tidak dilakukan karena akan menyebabkan diskriminasi terhadap masyarakat lainnya.

Kepada pemerintah daerah dan KPU Kabupaten Cilacap, diharapkan untuk terus melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender dalam keterwakilan perempuan di politik. Hal ini penting agar seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, termotivasi untuk berpartisipasi dalam dunia politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, S. (2019). Membangun Pendidikan Berwawasan Gender. Yinyang : Jurnal Studi Islam Gender dan Anak.
- Alfian, R. (2016). Pengantar Gender dan Feminisme. Yogyakarta : Garudhawaca
- Ema, T. (2016) Pembangunan Manusia Berbasis Gender. Jakarta : CV Lintas Khatulistiwa
- Moleong. Lexcy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Widjajanti, M. Santoso. (2016). Penelitian dan Pengurustamaan Gender : Sebuah Pengantar. Jakarta : Lipi Press.